



**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN
PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA: STUDI
KEPUSTAKAAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Lestari Handayani¹, Pratiwi Dwisuratno Putri², Diane Nur Azizah³

Sekolah Tinggi Agama Islam Pelita Nusai^{1,2,3}

Email: lestarihandayani765@gmail.com¹, pratiwi7371@gmail.com²,
dianenurazizah744@gmail.com³

ABSTRAK

Pertumbuhan perekonomian merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi sektoral. Namun kebijakan ekonomi yang di terapkan selama ini masih di dominasi oleh pendekatan ekonomi konvensional, sehingga diperlukan kajian dari perspektif ekonomi syariah yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, fatwa DSN-MUI, serta literatur ekonomi Islam yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah instrumen kebijakan pemerintah dan keterkaitannya dengan prinsip serta mekanisme ekonomi syariah, khususnya dalam sektor keuangan dan perbankan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan keuangan syariah, penggunaan instrumen syariah, serta penguatan peran perbankan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian. Kebijakan tersebut mendorong pembiayaan sektor produktif, meningkatkan inklusi keuangan, dan memperkuat stabilitas ekonomi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang terarah, konsisten, dan berlandaskan prinsip ekonomi syariah berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Ekonomi Syariah, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter

ABSTRACT

Economic growth is a key indicator of the success of national development and public welfare. The government plays a strategic role in driving economic growth through fiscal, monetary, and sectoral regulatory policies. However, current economic policies are still dominated by conventional economic approaches,

necessitating a study from a sharia economic perspective that emphasizes the principles of justice, welfare, and balance. Therefore, this study aims to analyze government policies to promote economic growth in Indonesia from a sharia economic perspective. The research method used is qualitative descriptive research with a literature review approach. Data were obtained from books, scientific journals, policy documents, fatwas from the National Sharia Council (DSN-MUI), and relevant Islamic economics literature. The analysis was conducted by examining government policy instruments and their relationship to sharia economic principles and mechanisms, particularly in the sharia financial and banking sectors. The study's findings indicate that government policies supporting the development of Islamic finance, the use of Islamic instruments, and strengthening the role of Islamic banking, including Bank Syariah Indonesia, have positively contributed to economic growth. These policies encourage financing for productive sectors, increase financial inclusion, and strengthen economic stability. The study's conclusions confirm that targeted, consistent government policies based on Islamic economic principles play a crucial role in promoting sustainable and equitable economic growth in Indonesia.

Keywords: Government Policy, Economic Growth, Islamic Economics, Fiscal Policy, Monetary Policy

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan perekonomian global yang penuh ketidakpastian dalam rentang waktu 2010-2025, perekonomian di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti perlambatan ekonomi tekanan inflasi, fluktuasi nilai tukar, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional. Kondisi ini menuntut peran aktif pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang tidak hanya mampu menjaga stabilitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan inklusif. yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan.

Pemerintah Indonesia merespons dinamika tersebut melalui berbagai kebijakan ekonomi, antara lain kebijakan fiskal melalui pengelolaan anggaran negara dan pemberian stimulus ekonomi, kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, serta kebijakan sektoral yang diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meskipun kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dalam praktiknya masih ditemui berbagai permasalahan struktural, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, kesenjangan

pembangunan antarwilayah, serta keterbatasan akses pembiayaan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum sepenuhnya diiringi dengan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Pendekatan ekonomi konvensional yang selama ini mendominasi kebijakan pemerintah dinilai lebih berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi aspek keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, perspektif ekonomi syariah menjadi relevan untuk dikaji, mengingat ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam proses pembangunan ekonomi.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menganalisis kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan pendekatan dan indikator ekonomi konvensional. Dalam perspektif ekonomi syariah, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan produk domestik bruto tetapi juga dari tercapainya keadilan, pemerataan kesejahteraan, serta kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, serta menghindari praktek ekonomi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian idealnya selaras dengan nilai-nilai ekonomi syariah agar pertumbuhan yang dicapai bersifat inklusif dan berkeadilan.

Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian dari perspektif ekonomi syariah masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian (research gap), khususnya terkait bagaimana kebijakan pemerintah dapat dianalisis dan dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Bagaimana peran dan dampak kebijakan pemerintah tersebut terhadap pembangunan ekonomi nasional ditinjau dari perspektif ekonomi syariah?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia serta mengkaji peran dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi nasional berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan analisis kebijakan ekonomi pemerintah yang dikaji secara sistematis melalui perspektif ekonomi syariah berbasis studi kepustakaan. Penelitian ini tidak hanya menelaah kebijakan fiskal, moneter, dan struktural secara normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada pendekatan ekonomi makro konvensional atau analisis empiris kuantitatif, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan. penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kebijakan ekonomi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai ekonomi syariah melalui pendekatan studi kepustakaan. yang komprehensif.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan suatu negara. Menurut (Todaro & Smith, 2015), pembangunan yang menunjukkan peningkatan kapasitas produksi suatu negara dalam jangka panjang. Selain teori klasik dan neoklasik, teori pertumbuhan ekonomi modern menekankan pentingnya peran institusi, kualitas kebijakan publik, dan inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Menurut (Seran et al., 2025), dalam teori pertumbuhan endogen, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh investasi pada sumber daya manusia, inovasi, dan pengetahuan. Selanjutnya, (Acemoglu et al., 2012), menegaskan bahwa kualitas institusi dan kebijakan pemerintah yang inklusif berperan besar dalam menentukan keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Kebijakan pemerintah memiliki peran sentral dalam menciptakan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut (Schools, 2004), kebijakan fiskal dan peran aktif pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar dan ketimpangan ekonomi. Kebijakan fiskal yang tepat dapat mendorong sektor produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, (Gusnawati & Ardiningrum, 2021) menjelaskan bahwa kebijakan moneter tidak hanya

berfungsi menjaga stabilitas harga, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas sistem keuangan. Selain kebijakan fiskal dan moneter, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus kebijakan pemerintah modern dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (Kementrian Keuangan RI, 2024).

Dalam perspektif ekonomi syariah kontemporer, pertumbuhan ekonomi harus diarahkan pada pencapaian kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. (Ibn Khaldun, 2015), menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam Islam harus selaras dengan nilai moral dan tujuan pembangunan manusia, bukan semata-mata peningkatan output. Lebih lanjut, (Chapra, 2016), menyatakan bahwa ekonomi syariah modern menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan publik dan prinsip maqashid syariah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip tersebut menuntut kebijakan pemerintah yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga mengurangi ketimpangan dan meningkatkan inklusi ekonomi.

Kerangka pemikiran konseptual penelitian ini disusun berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi modern, kebijakan pemerintah kontemporer, serta prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pemerintah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan pembangunan sektor riil yang efektif (Mankiw, 2021). Dalam perspektif ekonomi syariah, kebijakan pemerintah perlu diselaraskan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sebagaimana dikemukakan oleh (Ibn Khaldun, 2015). Integrasi kebijakan ekonomi modern dengan nilai-nilai ekonomi syariah diyakini mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan konsep, kebijakan, dan pemikiran

teoretis yang berkembang dalam literatur ekonomi, khususnya ekonomi syariah, tanpa menggunakan pengujian statistik atau analisis kuantitatif.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Penelitian ini mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kebijakan pemerintah di bidang fiskal, moneter, dan pembangunan ekonomi serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen tertulis. Sumber data penelitian meliputi:

1. Buku teks ekonomi makro, ekonomi pembangunan, dan ekonomi Islam yang ditulis oleh akademisi dan pakar di bidangnya;
2. Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional terakreditasi, maupun jurnal internasional bereputasi, yang diterbitkan dalam rentang waktu antara 2009–2024;
3. Dokumen resmi pemerintah, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta kebijakan terkait fiskal dan pembangunan ekonomi;
4. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkaitan dengan indikator pertumbuhan ekonomi nasional; yang diakses melalui situs resmi (Badan Pusat Statistik 2023),
5. Publikasi resmi Bank Indonesia (Indonesia 2024) dan Kementerian Keuangan, (Kementerian Keuangan RI 2024) yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan fiskal.

Literatur yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

1. Relevan dengan topik kebijakan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi;
2. Memuat pembahasan mengenai kebijakan fiskal, moneter, pembangunan ekonomi, atau ekonomi syariah;
3. Diterbitkan dalam rentang waktu 1997–2024 untuk memastikan keterkinian data dan analisis;
4. Bersumber dari penerbit, lembaga, atau jurnal ilmiah yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur, yaitu dengan membaca secara cermat, mencatat, serta mengklasifikasikan teori, konsep, dan temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara tematis sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai jenis sumber, seperti buku akademik, jurnal ilmiah, laporan BPS, serta dokumen resmi pemerintah dan lembaga keuangan. Teknik ini bertujuan untuk memastikan konsistensi data dan mengurangi potensi bias dalam penafsiran.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan sistematis melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu memilih dan menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian;
2. Pengelompokan data, yaitu mengklasifikasikan data berdasarkan jenis kebijakan pemerintah (fiskal, moneter, dan pembangunan ekonomi);
3. Analisis dan interpretasi, yaitu mengkaji kebijakan pemerintah berdasarkan teori ekonomi makro dan prinsip-prinsip ekonomi syariah;
4. Sintesis temuan, yaitu menghubungkan hasil analisis dengan tujuan penelitian;
5. Penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara sistematis dan logis berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan kebijakan pemerintah di bidang fiskal, moneter, dan pembangunan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian nasional dengan menggunakan data sekunder dalam periode 1997-2024. Batasan ini ditetapkan agar pembahasan tetap terfokus dan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan terhadap berbagai literatur ilmiah, ditemukan bahwa kebijakan pemerintah merupakan instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. Kebijakan pemerintah dipahami sebagai tindakan terencana yang mencakup tujuan, strategi, serta instrumen pelaksanaan untuk mencapai kepentingan publik (Anderson, 1997). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif ekonomi konvensional, peran pemerintah berfokus pada perbaikan kegagalan pasar, stabilisasi ekonomi, dan distribusi pendapatan (Musgrave & Musgrave, 1989). Kebijakan fiskal dan moneter menjadi instrumen utama dalam menjaga keseimbangan ekonomi makro.

Sementara itu, dalam perspektif ekonomi syariah, kebijakan pemerintah tidak hanya dinilai dari efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Schools, 2004). Kebijakan fiskal syariah menekankan pemerataan kesejahteraan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai mekanisme distribusi pendapatan (Ibn Khaldun, 2015). Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan moneter syariah menggantikan instrumen bunga dengan sistem bagi hasil dalam pengelolaan pembiayaan dan likuiditas. Sistem ini berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan penguatan sektor riil, (Ibn Khaldun, 2015).

Pembahasan

Konsep Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi

Secara konseptual, kebijakan pemerintah merupakan serangkaian tindakan atau keputusan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bernegara, termasuk di bidang ekonomi. Kebijakan pemerintah mencerminkan pilihan-pilihan strategis yang diambil untuk mengatasi berbagai persoalan publik seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan (Anderson, 1997).

Dalam perspektif ekonomi, kebijakan pemerintah berfungsi sebagai instrumen untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas ekonomi agar berjalan secara stabil dan berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran penting dalam

memperbaiki kegagalan pasar, menjaga stabilitas ekonomi makro, serta mewujudkan keadilan distribusi pendapatan melalui kebijakan fiskal dan moneter, (Musgrave & Musgrave, 1989).

Lebih lanjut, dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sosial. (Seftarita, 2005), menegaskan bahwa kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dengan tetap memperhatikan nilai-nilai moral dan etika. Sejalan dengan itu, kebijakan ekonomi juga perlu didukung oleh instrumen-instrumen yang mampu mendorong pemerataan kesejahteraan dan penguatan sektor riil (Eva et al., 2020). Selain itu, peran kebijakan ekonomi syariah juga menekankan pentingnya stabilitas sistem keuangan yang bebas dari praktik riba melalui penerapan mekanisme bagi hasil (Hasan et al., 2024), dan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas, karena investasi pada sektor ini meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memastikan distribusi manfaat yang merata, sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, integrasi kebijakan fiskal, moneter, dan pembangunan struktural yang selaras prinsip ekonomi syariah menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan terhadap berbagai literatur berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber relevan lainnya, ditemukan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Kebijakan tersebut terutama diwujudkan melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan regulasi sektoral yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Dalam perspektif ekonomi syariah, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (al-adl), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), serta tanggung jawab sosial. Literatur yang dikaji juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pemerataan pendapatan dan penguatan sektor

riil sejalan dengan tujuan ekonomi syariah. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM, pengelolaan keuangan negara yang transparan, serta penguatan sistem keuangan syariah dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara tujuan kebijakan pemerintah dengan prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Peran Pemerintah dan Kebijakan Ekonomi dalam Perspektif Syariah

Peran pemerintah dalam ekonomi syariah mencakup fungsi regulasi, fasilitasi, dan distribusi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah bertanggung jawab memastikan distribusi kekayaan yang adil, mencegah praktik ekonomi yang merugikan, serta menyediakan kebutuhan dasar masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Dalam konteks negara berkembang, fungsi ini diperluas untuk mencakup penguatan kelembagaan, penyediaan barang publik strategis, dan perlindungan sosial (Tanzi, 1997).

Dalam perspektif ekonomi Islam, peran negara tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan konsep maqāsid al-syarī‘ah yang menekankan perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl) sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi Islam (Reza Bahtiar, n.d.).

Dibandingkan dengan pendekatan ekonomi konvensional yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi semata, pendekatan ekonomi syariah menekankan kualitas pertumbuhan, pemerataan hasil pembangunan, serta keberlanjutan sosial. Ibn Khaldun menegaskan bahwa keadilan dalam kebijakan negara merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Ibn Khaldun, 2015). Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dinilai efektif secara syariah apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi.

Kebijakan Fiskal: Analisis Konvensional dan Syariah

Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengelola perekonomian melalui pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara. Secara konvensional, kebijakan fiskal ekspansif digunakan untuk mendorong permintaan agregat melalui peningkatan belanja pemerintah dan insentif pajak. Di Indonesia, kebijakan ini terbukti mampu mendorong pemulihan ekonomi, terutama melalui belanja infrastruktur, perlindungan sosial, dan stimulus sektor produktif, (Cahyo et al., 2023).

Dalam perspektif ekonomi syariah, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen distribusi keadilan. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan fiskal negara, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan perlindungan kelompok rentan. Dengan demikian, kebijakan fiskal syariah lebih menekankan pemerataan kesejahteraan dibandingkan sekadar peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Analisis kritis menunjukkan bahwa kebijakan fiskal konvensional berpotensi menimbulkan masalah defisit dan utang jika tidak dikelola secara hati-hati. Sebaliknya, pendekatan syariah menekankan prinsip kehati-hatian (*hiṭāṭ*), transparansi, dan keberlanjutan, sehingga lebih selaras dengan tujuan jangka panjang pembangunan ekonomi.

Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi dalam Perspektif Syariah

Kebijakan moneter bertujuan menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan. Dalam sistem konvensional, instrumen utama kebijakan moneter adalah suku bunga. Namun, dalam ekonomi syariah, penggunaan suku bunga tidak diperkenankan karena mengandung unsur riba. Oleh karena itu, kebijakan moneter syariah menggunakan instrumen alternatif seperti bagi hasil, pembiayaan berbasis aset, dan pengendalian likuiditas melalui perbankan syariah.

Stabilitas moneter dalam perspektif syariah tidak hanya bertujuan menjaga inflasi, tetapi juga memastikan aktivitas ekonomi berjalan secara adil dan produktif. Kebijakan moneter yang selaras dengan prinsip syariah dapat mendorong sektor riil

dan mengurangi spekulasi, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam perspektif syariah, investasi pada infrastruktur dan pendidikan merupakan bentuk pemenuhan *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql*, karena bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas manusia.

Namun, analisis kritis menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur harus disertai dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya merata dan tidak menimbulkan ketimpangan antarwilayah. Kebijakan pembangunan yang selaras dengan prinsip syariah menuntut adanya keadilan distribusi dan keberpihakan kepada masyarakat luas.

Analisis Perbandingan Kebijakan Pemerintah Secara Konvensional Dan Syariah

1. Landasan Filosofis dan Tujuan Kebijakan Dalam sistem ekonomi konvensional, kebijakan pemerintah umumnya berlandaskan pada teori ekonomi neoklasik dan Keynesian yang menempatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan efisiensi pasar sebagai tujuan utama. Keberhasilan kebijakan diukur terutama melalui indikator makroekonomi seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi, dan pengangguran Sementara itu, dalam perspektif ekonomi syariah, kebijakan pemerintah tidak hanya bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Tujuan kebijakan ekonomi syariah berlandaskan pada *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai sarana, bukan tujuan akhir.
2. Kebijakan fiskal konvensional menitikberatkan pada pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara untuk memengaruhi permintaan agregat. Instrumen utamanya meliputi pajak, belanja negara, subsidi, serta pembiayaan defisit



melalui utang berbunga. Fokus utama kebijakan ini adalah mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek maupun menengah. Sebaliknya, kebijakan fiskal syariah menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan. Sumber penerimaan negara tidak hanya berasal dari pajak, tetapi juga dari instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pembiayaan defisit dalam perspektif syariah diupayakan melalui instrumen yang bebas riba, seperti sukuk negara. Belanja negara diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.

3. Kebijakan Moneter dalam sistem konvensional, kebijakan moneter dijalankan melalui instrumen suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengaturan likuiditas perbankan. Suku bunga menjadi instrumen utama untuk mengendalikan inflasi dan memengaruhi aktivitas ekonomi, meskipun berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Sebaliknya, kebijakan moneter syariah tidak menggunakan instrumen berbasis bunga (riba). Pengendalian moneter dilakukan melalui instrumen bagi hasil, pengaturan nisbah pembiayaan, serta instrumen pasar uang syariah. Tujuan utama kebijakan moneter syariah tidak hanya stabilitas harga, tetapi juga mendorong pembiayaan sektor riil dan aktivitas ekonomi yang produktif.
4. Mekanisme Distribusi dan Keadilan Sosial Dalam pendekatan konvensional, distribusi pendapatan umumnya diserahkan kepada mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah melalui pajak progresif dan program bantuan sosial. Namun, mekanisme ini sering kali belum sepenuhnya mampu mengatasi ketimpangan pendapatan secara struktural. Sementara itu, ekonomi syariah menempatkan distribusi kekayaan sebagai bagian integral dari kebijakan ekonomi. Instrumen seperti zakat dan wakaf berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang bersifat wajib dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan ekonomi syariah secara normatif lebih kuat dalam mendorong pemerataan dan keadilan sosial.
5. Peran Negara dalam Perekonomian, dalam sistem konvensional, peran negara bersifat fleksibel, mulai dari minimalis hingga intervensionis, tergantung pada paradigma yang digunakan. Negara berfungsi sebagai regulator, stabilisator, dan fasilitator pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif syariah, negara memiliki



peran moral dan institusional yang lebih tegas, yaitu memastikan seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, menghindari praktik riba, gharar, dan maysir, serta melindungi kepentingan masyarakat luas. Negara bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

6. Orientasi Pembangunan Ekonomi, Pembangunan ekonomi konvensional cenderung berorientasi pada pertumbuhan dan efisiensi ekonomi. Aspek etika dan moral sering kali bersifat pelengkap. Sebaliknya, pembangunan ekonomi syariah bersifat holistik, mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan moral. Pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan nilai-nilai etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial.
7. Sintesis Analitis, Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah dalam perspektif konvensional lebih menekankan efektivitas ekonomi dan stabilitas makro, sedangkan kebijakan ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memasukkan dimensi etika, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam kebijakan pemerintah berpotensi memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi agar lebih inklusif dan berkelanjutan.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah secara konvensional lebih berorientasi pada pencapaian stabilitas dan pertumbuhan ekonomi makro melalui mekanisme pasar dan instrumen berbasis bunga. Pendekatan ini relatif efektif dalam mendorong pertumbuhan jangka pendek, namun berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan redistributif yang kuat. Sebaliknya, kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih holistik dengan mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan etika.

Kebijakan fiskal dan moneter syariah tidak hanya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keadilan distribusi dan keberlanjutan pembangunan. Dengan menekankan larangan riba, penguatan sektor riil, serta optimalisasi instrumen sosial Islam, kebijakan ekonomi syariah berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam kebijakan konvensional seperti penggunaan sukuk negara, penguatan perbankan syariah, dan

sinergi zakat dengan APBN dapat menjadi alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Dampak dan Tantangan Kebijakan Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan pemerintah berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, birokrasi yang kurang efisien, serta ketidakpastian ekonomi global masih menjadi hambatan utama.

Dalam perspektif ekonomi syariah, tantangan tersebut menuntut penguatan tata kelola pemerintahan yang amanah, transparan, dan akuntabel. Kebijakan ekonomi yang berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah* diharapkan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Hubungan Kebijakan Pemerintah dengan Prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah

Kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi syariah tidak hanya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* (Chapra, 2016) sebagai tujuan utama syariat Islam. *Maqāṣid al-syarī'ah* menekankan perlindungan dan pemeliharaan lima aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, kebijakan pemerintah idealnya diarahkan untuk mendukung tercapainya kelima tujuan tersebut secara seimbang.

1. Kebijakan Pemerintah dan Perlindungan Agama (*Ḥifẓ al-Dīn*), kebijakan pemerintah berkontribusi terhadap perlindungan agama melalui penyediaan regulasi yang menjamin kebebasan beragama dan pelaksanaan ibadah, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks ekonomi syariah, kebijakan yang mendukung pengembangan keuangan syariah, seperti regulasi perbankan syariah dan fatwa ((Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia



2000)DSN-MUI, mencerminkan upaya negara dalam memfasilitasi masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan keyakinan agama tanpa praktik riba, gharar, dan maysir.

2. Kebijakan Pemerintah dan Perlindungan Jiwa (Ḥifẓ al-Nafs), Perlindungan jiwa diwujudkan melalui kebijakan pemerintah yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Kebijakan fiskal berupa belanja negara untuk sektor kesehatan, jaminan sosial, dan subsidi kebutuhan pokok sejalan dengan prinsip ḥifẓ al-nafs, karena bertujuan menjaga kelangsungan hidup dan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan.
3. Kebijakan Pemerintah dan Perlindungan Akal (Ḥifẓ al-Aql), kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia berperan penting dalam menjaga dan mengembangkan akal. Alokasi anggaran untuk pendidikan, riset, dan pelatihan tenaga kerja merupakan bentuk implementasi ḥifẓ al-aql. Selain itu, regulasi yang mencegah praktik ekonomi merugikan, seperti penipuan dan eksploitasi informasi, juga mendukung terciptanya aktivitas ekonomi yang rasional dan beretika.
4. Kebijakan Pemerintah dan Perlindungan Keturunan (Ḥifẓ al-Nasl), perlindungan keturunan tercermin dalam kebijakan pemerintah yang mendukung kesejahteraan keluarga, seperti kebijakan ketenagakerjaan, perlindungan ibu dan anak, serta program pengentasan kemiskinan. Kebijakan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan pendapatan yang layak membantu menjaga stabilitas keluarga dan keberlanjutan generasi, yang sejalan dengan prinsip ḥifẓ al-nasl.
5. Kebijakan Pemerintah dan Perlindungan Harta (Ḥifẓ al-Māl), dalam perspektif ekonomi syariah, perlindungan harta menjadi aspek penting dalam kebijakan ekonomi. Kebijakan pemerintah yang menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, serta menciptakan sistem keuangan yang adil dan transparan merupakan wujud ḥifẓ al-māl. Selain itu, kebijakan yang mendorong penggunaan instrumen keuangan syariah, seperti sukuk dan pembiayaan berbasis bagi hasil, membantu melindungi harta masyarakat dari praktik riba dan spekulasi berlebihan.

Sintesis Hubungan Kebijakan Pemerintah dan Maqāṣid al-Syarī‘ah, secara keseluruhan, kebijakan pemerintah yang selaras dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah tidak hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada terciptanya keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan keberlanjutan pembangunan. Integrasi nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah dalam kebijakan fiskal, moneter, dan pembangunan ekonomi memungkinkan pemerintah menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, stabil, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dilaksanakan secara sinergis terbukti mampu mendorong aktivitas ekonomi nasional. Kebijakan fiskal berperan melalui peningkatan belanja negara pada sektor-sektor produktif, pemberian subsidi yang tepat sasaran, serta insentif perpajakan yang mendorong konsumsi, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada kualitas tata kelola anggaran, tingkat transparansi, serta keberlanjutan fiskal agar tidak menimbulkan tekanan terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang.

Di sisi lain, kebijakan moneter berperan penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi melalui pengendalian inflasi, pengaturan likuiditas, dan stabilisasi nilai tukar. Stabilitas makroekonomi yang terjaga menciptakan iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari perspektif ekonomi syariah, keberhasilan kebijakan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuannya dalam mewujudkan keadilan distribusi, pemerataan kesejahteraan, serta kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘a.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperkuat perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi yang berorientasi pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan

alokasi belanja negara pada sektor-sektor produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, memperluas penggunaan instrumen keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan, serta memperkuat peran lembaga keuangan dan perbankan syariah dalam mendorong sektor riil. Selain itu, koordinasi yang lebih erat antara otoritas fiskal dan moneter perlu terus ditingkatkan guna menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah yang terarah, konsisten, dan berlandaskan nilai-nilai syariah tidak hanya mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah disarankan untuk memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dengan memperhatikan prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas belanja publik pada sektor-sektor produktif, memperluas pemanfaatan instrumen ekonomi dan keuangan syariah, serta memperkuat tata kelola kebijakan agar lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, penguatan peran sektor keuangan syariah dapat menjadi alternatif strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian empiris dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran guna mengukur secara lebih spesifik dampak kebijakan fiskal dan moneter, termasuk instrumen syariah, terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas fokus pada analisis perbandingan antarnegara atau pengaruh kebijakan ekonomi syariah terhadap kesejahteraan masyarakat secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, Daron, Robinson, James A. 2012. *Why Nation Fail :The Origins Of Power, Prosperity, and Poverty*.
- Anderson, James Emory. 1997. *Public Policy Making*. 3rd ed. ed. Helen Bronk.

- Houghton Mifflin Company.
- Badan Pusat Statistik. 2023. “BRS No. 76 Th.XXVI, 6 November 2023 Tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2023.” <https://www.bps.go.id> (76): 16.
- Cahyo, Bagus Dwi, Ellen Praditha, and Fakhri Dani Alfarizi. 2023. “Peranan Pemerintah Dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Pasca Pandemi Covid-19.” 4(1): 1–13.
- Chapra, M. Umer. 2016. *Islamic Moral Economy as the Foundation of Islamic Finance*.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. 2000. “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DSN-MUI.”
- Eva, Dina, Santi Silalahi, and Kata Kunci. 2020. “Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19.” 3(2): 156–67.
- Gusnawati, Wahyuningtyas Alya, and Lintang Ardiningrum. 2021. “Tinjauan Atas Langkah Pemerintah Dalam Mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal Terkait Apbn.” 1.
- Hasan, Asyari, Anisa Nurfitriani, Hesti Putri Rachman, Reja Wardana Putra, and Muhammad Fikri Fadhillah. 2024. “Peran Pemerintah Dalam Memajukan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(17): 187–96.
- Ibn Khaldun. 2015. *The Muqaddimah :An Introduction To History*.
- Indonesia, Bank. 2024. “Indonesian Economic Report 2023 : Sinergi Memperkuat Ketahanan Dan Kebangkitan Ekonomi Nasional Tersedia Pada.” <https://www.bi.go.id>.
- Kementerian Keuangan RI. 2024. “Kinerja APBN 2023 Kuat Dan Sehat 1.” <https://www.menkeu.go.id>: 1–90.
- Musgrave, Richard A, and Peggy B Musgrave. 1989. *Public Finance In Theori And Practice*. 5th ed. ed. Scott D Stratford. MCGRAW-HILL BOOK COMPANY.
- Reza Bahtiar, Ahmad. *Definisi Ushul Fiqih*.
- Schools, Asia-pacific. 2004. “The Role of Public Administration in Alleviating Poverty and Improving Governance.” (December).

Seftarita, Chenny. 2005. “Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Simposium Riset Ekonomi II. Surabaya.*

Seran, Stefanus R, Paulina M S Gomes, Jeane Ivoni Bria, and Maria Selvania Piri. 2025. “Peran Pemerintah Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” 8(3): 988–93.

Todaro dan Smith. 2015. *Ekonomi Development.*